

Bidangunggulan:
Bidanglingkungan

Kode>NamaRumpunIlmu:
192/KonservasiSumberdayaHutan

Abstrak dan Executive Summary

PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



KAUM MISKIN DI KAWASAN PINGGIRAN HUTAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (TAHUN KEDUA)

TIM PENGUSUL

Drs. IG. Krisnadi, M.hum

NIDN 0028026205

Suharto, SS

NIDN 0021097006

Didanai BOPTN Universitas Jember Tahun Anggaran 2014

Nomor : 337/UN 25.3.1/LT.6/ 2014

UNIVERSITAS JEMBER

Oktober 2014

**KAUM MISKIN DI KAWASAN PINGGIRAN HUTAN
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (TAHUN KEDUA)**

Peneliti : IG. Krisnadi¹, Suharto²

Mahasiswa Terlibat : Ucik Wulandari³, Fitriah Hidayati⁴, Akhmad Sidik⁵

Sumber Dana : BOPTN Perguruan Tinggi

¹Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

²Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

³Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

⁴Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

⁵ Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

ABSTRAK

KAUM MISKIN DI KAWASAN PINGGIRAN HUTAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (Tahun Kedua) Poor Community in the forest edge of Meru Betiri National Park

Oleh: Drs. IG. Krisnadi, M.Hum*

Focus of this research is the empowerment of the poor community in the forest edge of Meru Betiri National Park through the perspective of Environmental History. This research aims to improve the community prosperity in the region sustainably through the forest exploitation as natural resource. This research is urgent and significant since this research is giving an economical change for the marginal community in the forest edge of Meru Betiri National Park to exploit the forest. Even though culturally the forest edge community has direct access to the forest, but the community does not able to optimize the exploitation of the forest and take it as a natural resource to improve their prosperity. The government rules that states *mastery of the forest by the state* make this forest fringe community has less power to mastery the forest in their environment and also the low quality of human resource in managing the forest bring poverty to the community. One of the effects of such conditions is illegal looting that creates damages in several areas of the Meru Betiri National Park.

Keywords: Meru Betiri, Poverty, the forest edge

KAUM MISKIN DI KAWASAN PINGGIRAN HUTAN TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (Tahun Kedua)

Abstrak : Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan kaum miskin di kawasan pinggiran hutan Taman Nasional Meru Betiri dalam perspektif sejarah lingkungan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut secara berkesinambungan melalui pemanfaatan hutan sebagai sumber hayati. Penelitian ini sangat urgent dan signifikan, karena pada kenyataannya peluang ekonomi yang ditawarkan hutan bagi masyarakat pinggiran hutan bersifat marginal. Meskipun secara kultural masyarakat pinggiran hutan memiliki akses langsung terhadap hutan, namun masyarakatnya belum mampu mengoptimalkan hutan sebagai sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraannya. Berbagai peraturan secara eksplisit menempatkan pengusaan hutan oleh negara, menyebabkan komunitas masyarakat pinggiran hutan kurang memiliki “kuasa” terhadap hutan yang justru berada di sekitarnya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengeksplorasi hutan, menyebabkan kemiskinan masyarakat pinggiran hutan. Salah satunya adalah terjadinya penjarahan hutan secara ilegal yang berdampak pada rusaknya sebagian areal Taman Nasional Meru Betiri.

Kata Kunci : Meru Betiri, kemiskinan, pinggiran hutan

**KAUM MISKIN DI KAWASAN PINGGIRAN HUTAN
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (Tahun Kedua)**

Peneliti : IG. Krisnadi¹, Suharto²

Mahasiswa Terlibat : Ucik Wulandari³, Fitriah Hidayati⁴, Akhmad Sidik⁵

Sumber Dana : BOPTN Perguruan Tinggi

Kontak email : Ignatius.krisnadi@gmail.com.id

Diseminasi (jika ada) : belum ada

¹Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

²Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

³Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

⁴Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

⁵Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember

Executive Summary

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai relasi institusi pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan perlu diuraikan untuk lebih memahami sejauh mana relasi tersebut berpengaruh terhadap ketidakberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selama sekian puluh tahun belum bahkan tidak terbangun hubungan sosial dan kultural yang harmonis antara institusi pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan. Secara realitas sosial, terjadi kesenjangan social yang tajam antara pihak pengelola hutan yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik (kaya) jika dibandingkan dengan masyarakat di sekitar hutan yang miskin secara secara ekonomi.

Selama ini belum terbangun relasi-relasi sosial dan kultural yang strategis yang memungkinkan mereka menjadi bagian integral dari suatu pengelolaan hutan. Jika polanya masih seperti ini sulit diharapkan terbangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan akan terstimulasi secara inheren jika mereka mendapatkan pilihan baru dari kebijakan yang ditempuh untuk memberdayakan tidak hanya secara ekonomis melainkan juga berbagai situasi sosial.

Isu tentang pemberdayaan masyarakat kawasan pinggiran hutan selama ini telah menjadi wacana yang sering kali didengungkan dalam rangka untuk lebih memperkuat posisi masyarakat terhadap negara. Dalam konteks mikro, hal ini dimaksudkan untuk lebih memposisikan mereka lebih baik dari sebelumnya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebenarnya mencoba mengimplementasikan model pemberdayaan yang dilakukan Departemen Kehutanan terhadap masyarakat.

Upaya untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga harus dicermati secara lebih kritis. Program atau “proyek” PHBM ini sudah seharusnya tidak dipahami dalam kerangka ketidakberdayaan dan upaya kompromi “mengendalikan dan

menjinakkan” masyarakat sekitar hutan yang sudah terlanjur diberi stigma berpotensi sebagai penjarah.

Konsep PHBM secara teoritis sebenarnya sangat idealis, yaitu ihtiar untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Momentum pelaksanaan PHBM ini muncul karena ribuan hektar hutan lindung dan hutan produksi dijarah secara masal bersamaan dengan gegap gempita reformasi merembvet sampai kawasan pinggiran sekitar hutan. Dengan PHBM diihtiarakan untuk menghutankan kembali hutan yang telah dijarah.

Pelaksanaan PHBM ternyata menimbulkan banyak bias dan penyimpangan. Dalam hal pengadaan bibit untuk menghutankan kembali hutan misalnya, Departemen Kehutanan menerapkan kontrak kerja dengan masyarakat sekitar hutan untuk menyediakan bibit yang nantinya Departemen Kehutanan membeli bibit tersebut. Pada kenyataannya, pengadaan bibit justru banyak dilakukan oleh aparat Departemen Kehutanan sendiri. Keterlibatan warga sekitar hutan hanyalah sebagai buruh yang memelihara bibit tersebut. Jika ada warga yang terlibat dalam pengadaan bibit, bisa dipastikan ia adalah pemilik modal besar yang selama ini menjadi rekanan Departemen Kehutanan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberadaan masyarakat Desa Sarongan sebagai desa penyangga hutan. Selama ini belum terbangun relasi-relasi sosial dan kultural yang strategis yang memungkinkan mereka menjadi bagian integral dari suatu pengelolaan hutan. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi dan kultural terkait dengan latar belakang kemiskinan struktural masyarakat Desa Sarongan;
- 2) Untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan masyarakat Desa Sarongan tentang fungsi hutan;
- 3) Untuk mengidentifikasi kebiasaan masyarakat Desa Sarongan yang diklaim melakukan penjarahan hutan;

- 4) Untuk melacak apakah pihak pengelola hutan Taman Nasional Meru Betiri ikut mengeksploitasi hutan untuk memperkaya diri.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya hendak merumuskan suatu konsep untuk mengubah pola pikir atau pemahaman ekologis masyarakat sekitar hutan maupun institusi pengelola hutan (negara). Kemiskinan yang terjadi pada komunitas masyarakat pinggiran hutan serta persoalan pelestarian kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri merupakan dua kutub yang sulit dipertemukan. Namun, dengan bertumpu pada pendekatan ekologi budaya diharapkan dapat dicari solusi terbaik agar keduanya saling menguntungkan. Kaidah dasar ekologi budaya ialah pembedaan antara lingkungan sebagaimana adanya dengan lingkungan efektif. Lingkungan efektif ialah lingkungan sebagaimana dikonseptualisasikan, dimanfaatkan dan dimodifikasi manusia (Kaplan, 1999).

1.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan capaian hasil dari kegiatan penelitian ini sampai dengan pertengahan Bulan Oktober 2014, dapat disampaikan bahwa penelitian tahun kedua ini telah terlaksana 100 % dari yang direncanakan. Mulai dari deskripsi dan analisis tentang situasi sosial ekonomi dan kultural terkait dengan latar belakang kemiskinan struktural masyarakat obyek penelitian, deskripsi dan analisis pandangan masyarakat Desa Sarongan tentang fungsi hutan, deskripsi dan analisis tentang kebiasaan masyarakat Desa Sarongan melakukan penjarahan hutan, deskripsi dan analisis tentang pihak pengelola hutan Taman Nasional Meru Betiri mengeksploitasi hutan untuk memperkaya diri.

Latar Belakang Kehidupan Masyarakat Desa Penyangga Hutan

Konsepsi Kultural Masyarakat Desa Sarongan tentang Fungsi Hutan

Menurut Peursen (1976:18-20), kebudayaan berkembang melalui tiga tahap yang meliputi: mistis, ontologis dan fungsional. Karakteristik perkembangan kebudayaan dalam tahap mistis menunjukkan ketidakberdayaan

manusia menghadapi kedahsyatan kekuatan alam semesta yang animistik dan dinamistik. Oleh karena itu sifat kompromi manusia terhadap kekuatan alam semesta menjadi pilihan yang tepat, dan bahkan pada tahap ini manusia menggantungkan diri pada kekuatan alam semesta untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup. Pada tahap ini manusia mencoba memberi persembahan (*sesajen*) berupa makanan, minuman, buah-buahan, minyak wangi, maupun barang-barang persembahan lainnya yang diyakini menjadi kegemaran makhluk-makhluk halus yang menghuni di sekitar rumahnya maupun yang menghuni hutan dengan harapan agar mereka tidak mencelakakan manusia (musibah), melainkan diharapkan dapat mendatangkan berkah bagi manusia. Namun tidak setiap orang dapat berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk halus atau dengan Illahi, sehingga manusia mencoba memecahkan permasalahan hidup yang menyangkut persoalan keselamatan, kerejekan, karier, sakit atau kesehatan (penyembuhan) dapat dilakukan dengan meminta jasa dukun atau para normal yang diyakini dapat menjadi mediator antara manusia dengan dunia gaib (IC. Sudjarwadi 20 Oktober 2013).

Tahap kebudayaan mistis, ontologik maupun fungsional bukanlah sebagai pentahapan kebudayaan meningkat dari kebudayaan animistik yang paling rendah meningkat ke tahap yang lebih tinggi yaitu ontologik, kemudian meningkat lagi ke tahap yang lebih tinggi yaitu kebudayaan fungsional. Masing-masing pentahapan tersebut terdapat unsur negatif dan positif. Oleh karena itu semestinya manusia tidak perlu merindukan kembali secara romantik suatu pola kebudayaan yang telah silam, tetapi juga jangan hanya memandang ke depan dengan mengharapakan suatu “utopia” sebuah bentuk masyarakat yang belum terwujud (Peursen, 1976: 234). Di dalam tahap kebudayaan modern sekarang ini yang semuanya serba komputerisasi, serba konsumtif, unsur-unsur kebudayaan mistis maupun ontologik masih nampak di dalam suatu masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Misal pada saat menjelang pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislative (pileg) maupun berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada), masih dimeriahkan oleh para kandidat eksekutor (Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah), legislator maupun

yudikator yang notabene sebagai manusia-manusia modern masih main dukun agar sukses atau memperoleh kemenangan di dalam pemilihan tersebut.

Kondisi semacam ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang tinggal di kawasan penyangga hutan TNMB di mana mereka di dalam mempertahankan hidupnya agar tetap *survival* senantiasa menciptakan strategi kebudayaan yang adaptif terhadap lingkungan alam sekitarnya. Mereka berupaya melakukan strategi kebudayaan yang beradaptasi dengan lingkungan alam sekitarnya baik secara mistik, ontologik maupun fungsional di dalam mengelola lingkungan agar memberikan kehidupan kepadanya, karena jika salah mengelola lingkungan akan dapat mencelakakan manusia, seperti datangnya musibah berupa bencana alam seperti tanah longsor, banjir maupun wabah berbagai penyakit (Naniek Kasniyah, 1987:11).

Pada kesempatan ini dicoba dibahas upaya mengeksplorasi pandangan masyarakat Desa Sarongan yang tinggal di kawasan penyangga hutan TNMB baik dalam tataran budaya mistik, ontologik maupun fungsional yang menyangkut beberapa persoalan sebagai berikut: (1) pandangan kultural masyarakat Desa Sarongan tentang pengertian hutan dan jenis-jenis hutan; (2) fungsi hutan bagi masyarakat Desa Sarongan; (3) pandangan dan sikap kultural masyarakat Desa Sarongan tentang pelestarian hutan; (4) pandangan dan sikap kultural masyarakat Desa Sarongan tentang penjarahan hutan.

Para informan dari masyarakat Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang berhasil diwawancarai dari kalangan elite desa adalah Kepala Desa Sarongan, Gunoto 47 tahun, Kepala Dusun Krajan, Suryono 45 tahun, Kepala Dusun Rajegwesi, Saman 46 tahun, para polisi hutan TNMB SPTN Wilayah I Sarongan: Akhmad Bagus Hidayat 45 tahun, Jumadiawan 38 tahun, Fendi Rahardjo 37 tahun, Ketut Efendy 35 tahun. Dari kalangan penjual makanan dan minuman (warung) yang berhasil diwawancarai adalah Winarsih 50 tahun dan Siti Khomsiyah 48 tahun, (Pemilik warung di Dusun Rajegwesi). Para

petani gula kelapa di Dusun Krajan yang berhasil diwawancarai adalah Yusak Wagimin 46 tahun, Sumaryo 48 tahun, Musa 47 tahun, Hamim 46 tahun, dan Nuralim 43 tahun. Para nelayan di lokasi wisata Rajegwesi yang diwawancarai adalah Rohmat 44 tahun, Samsul Arifin 38 tahun, Seger Sentosa 42 tahun, Abdullah 29 tahun, Budiono 40 tahun, Dayat 38 tahun, (Nelayan, Dusun Rajegwesi). Sedangkan buruh petani perkebunan coklat yang diwawancarai adalah Ponidi 35 tahun, Sugianto 33 tahun, Parmi 34 tahun, Sutinah 35 tahun, Rusmiatun 34 tahun. Wawancara juga dilakukan kepada Sudarmin 53 tahun, Riyanto 50 tahun, Lukman 46 tahun (Pencari kayu bakar, pemburu babi hutan, pemikat burung, pencari madu hutan).

Konsepsi Masyarakat tentang Penjarahan Hutan

Istilah penjarahan merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar jarah yang berarti merampas milik orang lain atau mengambil milik orang lain secara paksa. Dalam hal ini menjarah (kata kerja) dapat diartikan sebagai merampas habis milik orang lain atau mengambil semuanya milik orang lain secara paksa. Tindakan semacam ini sebagai tindak pidana dan melanggar hukum, karena menghilangkan hak milik orang lain secara paksa. Istilah penjarahan hutan diartikan sebagai tindakan manusia secara individu maupun kelompok secara paksa terhadap hutan yang dilakukan secara manual atau menggunakan alat-alat mesin ringan maupun berat yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Tindakan semacam ini telah menghilangkan hak kepemilikan pemerintah atas hutan, dan dapat merusak hutan yang akan mendatangkan berbagai bencana alam, sehingga dapat mengancam keselamatan umat manusia maupun akan merusak lingkungan hidup.

Masyarakat yang tinggal di kawasan penyangga hutan TNMB dari zaman dahulu hingga sekarang ini hidupnya menggantungkan diri pada hutan di sekitar tempat tinggalnya. Mereka sekarang ini berupaya memanfaatkan dengan akal-budinya untuk mengeksplorasi potensi sumberdaya alam yang ada di sekitarnya untuk mempertahankan hidup atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya

melalui pengembangan kebudayaan. Mereka menemukan dan melaksanakan strategi kebudayaan yang adaptif terhadap lingkungan alam sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Peursen, 1976: 234).

Konsepsi kultural masyarakat Sarongan tentang penjarahan hutan cenderung beragam baik dari kalangan masyarakat elite maupun kebanyakan. Andaikan ada perbedaan persepsi diantara keduanya, lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Namun kedua kelompok masyarakat Sarongan pada prinsipnya tidak setuju tindak penjarahan hutan, karena hutan sebagai sumber hayati bagi masyarakat dan harus dilestarikan. Masyarakat menyadari, kerusakan hutan akan berdampak munculnya bencana alam dan merusak lingkungan hidup. Mereka menyadari tindakan penjarahan hutan akan berakibat fatal bagi kerusakan hutan. Mereka dari hari-ke hari menjaga pelestarian hutan, menjaga agar hutan tidak dirusak oleh ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat kebanyakan tidak lagi menggantungkan hidupnya dari hutan, karena mereka kebanyakan memanfaatkan hasil kebun kelapa miliknya untuk dibuat gula atau dibuat kopra yang selanjutnya diambil minyaknya. Sementara itu bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir hutan yang berada di kawasan Dusun Rajegwesi, Teluk Hijau maupun di Sukamade lebih memanfaatkan menangkap ikan atau menyewakan perahu untuk keperluan wisata alam (Rohmat, 06 Juni 2014).

Kelompok masyarakat dari kalangan elite di Desa Sarongan pada hakekatnya menolak tindak penjarahan atau perambahan hutan, karena tindakan semacam itu dapat merusak hutan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, karena akan mendatangkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Menurut Kepala Dusun Krajan, Suryono, tindak penjarahan hutan sebagai tindakan orang yang tidak bertanggung jawab dan sebagai tindak kejahatan, karena merusak hutan dapat berdampak buruk bagi segala kehidupan. Hutan yang rusak akibat penjarahan akan mendatangkan berbagai bencana seperti bencana kekeringan, udara semakin panas, tanah longsor, dan banjir. Tindak penjarahan hutan sebagai tindak kriminal, karena para penjarah melakukan

pencurian kayu milik negara, sehingga harus dihukum seberat-beratnya (Jaka Sukmana 16 Juni 2014). Pendapat senada dilontarkan Kepala Desa Sarongan, Gunoto yang menyatakan bahwa tindak penjarahan hutan merupakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, berpikiran pendek dan egoistis yang ingin segera kaya tanpa memperhatikan dampaknya yang sangat mengerikan bagi kehidupan umat manusia. Para penjarah berpikiran dengan menebang kayu di hutan dan dijual akan segera memperoleh uang yang banyak. Namun tindakan semacam ini sebagai tindakan bodoh, karena dengan melakukan penebangan secara liar, hutan akan menjadi gundul, sehingga pada waktu musim kemarau akan terjadi bencana kekeringan dan cuaca sangat panas, serta pada waktu musim penghujan akan terjadi banjir bandang disertai tanah longsor, karena sudah tidak ada lagi akar pepohonan yang mampu menahan derasnya air hujan. Demikian juga jika hutan gundul tidak ada pepohonan yang dapat menahan kencangnya angin atau badai, sehingga yang terjadi kerusakan rumah-rumah warga yang disebabkan oleh kedaksyatan badai, angin puting beliung atau angin ribut (07 Juni 2014).

Suryono sebagai Kepala Dusun Krajan mengingatkan kepada para warganya agar tidak melakukan pencurian kayu di hutan, karena dapat merusak hutan dan mendatangkan bencana kekeringan dan cuaca semakin panas pada waktu musim kemarau, dan akan mendatangkan bencana banjir disertai tanah longsor pada waktu musim penghujan, sehingga akan dapat membahayakan kerlangsungan hidup umat manusia khususnya bagi warga yang tinggal di pinggiran kawasan hutan TNMB, Desa Sarongan. Berkenaan dengan itu ia mengutuk keras tindakan penjarahan hutan dan supaya dihukum seberat-beratnya kalau perlu diberi sanksi sosial seperti dikucilkan atau diusir dari masyarakat (06 Juni 2014). Pendapat senada dilontarkan Kepala Desa Sarongan, Gunoto yang mengatakan bahwa tindak pencurian atau penjarahan kayu di hutan sebagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, tindakan tidak bermoral, diharamkan oleh ajaran agama apapun, dan jika tidak segera sadar hingga ajal tiba, mereka akan masuk neraka. Tindakan semacam itu selain dapat merusak

hutan juga akan menimbulkan bencana kekeringan, cuaca semakin panas, banjir disertai tanah longsor, sehingga berdampak buruk bagi kehidupan manusia khususnya bagi mereka yang tinggal di pinggiran kawasan hutan TNMB khususnya di Wilayah I, Sarongan (06 Juni 2014).

1.5 Kesimpulan

Persepsi kultural masyarakat elite Desa Sarongan tentang arti dan jenis hutan di kawasan TNMB lebih luas jika dibandingkan dengan persepsi kultural masyarakat kebanyakan Desa Sarongan yang lebih sederhana. Perbedaan persepsi ini lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat elite lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat kebanyakan. Hutan oleh masyarakat elite desa diartikan sebagai kawasan pegunungan ditumbuhi aneka ragam tanaman sebagai tempat tinggal aneka satwa liar dan makhluk halus (wingit). Masyarakat kebanyakan mengartikan hutan sebagai kawasan pegunungan yang banyak ditumbuhi aneka macam tanaman dan satwa liar sebagai sumber hayati (penghidupan) bagi mereka yang dapat melestarikannya, dan sebagai sumber bencana bagi mereka yang merusak hutan. Masyarakat elite desa menganggap hutan di kawasan TNMB terdiri atas berbagai jenis hutan yang ditentukan berdasarkan zona meliputi Hutan Inti (Hutan Lindung), Hutan Rimba, Hutan Perairan, Hutan Pemanfaatan, Hutan Rehabilitasi, Hutan Tradisional dan Hutan Khusus. Dari kalangan masyarakat kebanyakan memandang jenis hutan yang berada di kawasan TNMB terdiri dua jenis yaitu Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Persepsi kultural masyarakat elite desa tentang fungsi hutan lebih luas jika dibandingkan dengan persepsi kultural fungsi hutan dari kalangan masyarakat kebanyakan. Perbedaan persepsi ini ditentukan tingkat pendidikan masyarakat elit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat kebanyakan. Masyarakat elite desa memandang hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, penyeimbang iklim, penjaga lapisan ozon tidak rusak, menahan kedaksyatan angin, menahan tanah longsor atau abrasi, menanggulangi

bencana banjir, penyimpanan air hujan sehingga terhindar dari kekeringan, sumber hayati, sebagai obyek wisata. Masyarakat kebanyakan Desa Sarongan memiliki pandangan kultural fungsi hutan yang diperoleh dari warisan para leluhur secara turun-temurun. Mereka berpandangan hutan bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan sebagai sumber mata air.

Masyarakat dari kalangan elite desa memiliki pandangan kultural yang sama tentang penjarahan hutan dengan masyarakat kebanyakan. Letak persamaannya keduanya menyadari pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan, sehingga penjarahan hutan dianggap merusak hutan dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, karena akan mendatangkan berbagai bencana. Diantara kedua lapisan masyarakat juga memiliki perbedaan dalam memandang penjarahan hutan. Masyarakat elite desa memandang pencarian kayu bakar dan bambu di hutan, perburuan babi hutan, pencarian madu hutan, memikat burung, perambahan hutan, pembakaran dedaunan kering yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan dianggap sebagai penjarahan hutan yang berpotensi merusak hutan dan merusak ekosistem. Masyarakat kebanyakan memandang penebangan kayu secara besar-besaran dilakukan Perhutani, pembukaan hutan untuk pemukiman baru, pembangunan pabrik, industri dianggap sebagai penjarahan hutan yang dapat merusak hutan dan kelestarian ekosistem.

Konsepsi kultural masyarakat Desa Sarongan dari kalangan generasi tua tentang pelestarian hutan diperoleh dari leluhurnya secara turun-temurun, dan pandangannya bersifat animistik-dinamistik. Mereka berpandangan hutan sebagai tempat tinggal para arwahnyapun tempat tinggal makhluk halus serta satwa liar (harimau, banteng) yang dianggap sebagai penunggu hutan. Masyarakat generasi tua berkeyakinan, para penunggu hutan akan mendatangkan berkah jika diberi sesaji, dan masyarakat mengikuti atau tidak melanggar pamali di dalam hutan. Para penunggu hutan akan mendatangkan musibah ketika masyarakat melakukan perusakan hutan. Masyarakat di kalangan generasi muda memperoleh pengetahuan pelestarian hutan dari para penyuluh lapang yang diselenggarakan

oleh Balai Konservasi Hutan, sehingga pandangan tentang pelestarian hutan lebih rasional dan sesuai dengan undang-undang kehutanan.

Kata Kunci: kaum miskin, pinggiran hutan, Meru Betiri.